

Tinjauan Mata Kuliah

Mata Kuliah **PAJAK PUSAT DAN DAERAH (EPFA4111)/ 4 SKS** merupakan salah satu mata kuliah yang memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan konseptual, dan praktis atau aplikasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa pemahaman konsep dasar Pajak Pusat dan Pajak Daerah melalui penjelasan tentang konsep, landasan hukum, perkembangan, serta latihan penghitungan pajak terutang. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan Upaya penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Sebelum mempelajari mata kuliah ini mahasiswa telah mengambil dan menguasai mata kuliah Pajak Pusat dan Daerah.

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah, termasuk retribusi daerah, menjelaskan subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif, sampai menentukan pajak terutang. Mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan prosedur perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mulai dari pendaftaran, pendataan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, sampai dengan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan bobot mata kuliah, mata kuliah Pajak Pusat dan Pajak Daerah ini diorganisasi menjadi 12 modul sebagai berikut.

- Modul 1: Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Perpajakan. Tujuan Pokok Bahasan ini adalah pemahaman tentang konsep dasar Perpajakan seperti pengertian, dasar hukum, sistem perpajakan, sampai dengan hambatan pemungutan pajak. Kemudian juga dijelaskan tentang sertifikasi konsultan pajak, sanksi, kepatuhan pajak, dan pengawasan perpajakan.
- Modul 2: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tujuan Pokok bahasan ini adalah kepada pemahaman tentang konsep dasar KUP dan prosedur perpajakan mulai dari pendaftaran dan pendataan, kewajiban pembukuan, penyetoran dan pelaporan pajak, sampai dengan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Selain itu juga bertujuan memberikan pemahaman tentang formulir-formulir perpajakan, upaya hukum dalam perpajakan, termasuk penegakan hukum melalui pemeriksaan dan penyidikan pajak.

- Modul 3: Konsep dan Penghitungan PPh Umum dan PPh Pasal 21. Tujuan pokok bahasan ini adalah agar mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar pajak penghasilan seperti pengertian, subjek, objek, PTKP, Tarif dan penghitungan pajak terutang. Selain itu juga bertujuan memberikan pemahaman tentang konsep dasar PPh pasal 21 dan kemampuan untuk mengaplikasikan penghitungan PPh Pasal 21 untuk berbagai jenis subjek pajak.
- Modul 4: Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan. Tujuan pokok bahasan ini adalah kepada penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 4 ayat 2.
- Modul 5: Pajak Penghasilan Final. Tujuan pokok bahasan ini adalah pemahaman konsep dasar PPh pasal 4 ayat (2) mulai dari objek pajak dan subjek pajaknya, Menghitung PPh pasal 4 ayat (2) dan pengisian SPT Masa PPh Final, dan Menguraikan konsep dasar PPh final dan penghitungan PPh final pasal 15.
- Modul 6: Penghitungan PPh Akhir Tahun dan Pelaporan SPT Tahunan WP Badan. Tujuan pokok bahasan ini adalah agar mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar penghitungan dan pelaporan pajak tahunan, membuat rekonsiliasi fiskal, menghitung PPh terutang, dan menuangkannya ke dalam formulir SPT Tahunan PPh Badan
- Modul 7 Penghitungan PPh Akhir Tahun dan Pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi. Tujuan pokok bahasan ini adalah agar mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar penghitungan dan pelaporan pajak tahunan, membuat rekonsiliasi fiskal atau menghitung Penghasilan Netto Menggunakan Normal, menghitung PPh terutang, dan menuangkannya ke dalam formulir SPT Tahunan WPOP yang sesuai.
- Modul 8: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Tujuan pokok bahasan ini adalah agar mahasiswa mampu mendemonstrasikan konsep dasar PPN dan PPnBM seperti karakteristik PPN, subjek dan objek PPN, pembuatan dan penggunaan faktur pajak, mekanisme pengkreditan pajak, sampai menentukan dasar pengenaan, tarif, dan PPN terutang.

- Modul 9: Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tujuan Pokok bahasan ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta perkembangan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara lebih spesifik, bahasan ini bertujuan agar mahasiswa mampu menarik benang merah antara konsep otonomi, desentralisasi, dan HKPD dengan pemungutan pajak dan retribusi di daerah.
- Modul 10: Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pokok bahasan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menggunakan konsep pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Bahasan ini memuat tentang Ketentuan Umum Pajak Pusat dan Pajak Daerah dan pengaturan PDRD menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- Modul 11: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pokok bahasan ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep, lingkungan, perkembangan pajak daerah di Indonesia. Kemudian, agar mahasiswa mampu mengidentifikasi subjek, objek, tarif, dasar pengenaan pajak, sampai penghitungan PDRD baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota.
- Modul 12: Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan. Pokok bahasan ini bertujuan agar mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan konsep penegakan hukum pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, mulai dari Penelitian, SP2DK, dan Pemeriksaan, Penagihan Pajak pengawasan fiskus lanjutan berupa Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan pajak.

Agar lebih memudahkan dalam memahami pengorganisasian mata kuliah ini, berikut disampaikan desain instruktusional yang menggambarkan tujuan instruktusional dari setiap topik bahasan dan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai dalam sebuah peta kompetensi.

Peta Kompetensi EPFA4111/Pajak Pusat dan Daerah/4 sks

